

Perbandingan Sistem Pemasyarakatan: Praktik Terbaik di Berbagai Negara

Annisa Nur Aziza^{1*}, Ali Muhammad²

^{1,2}Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Indonesia

*e-mail korespondensi: bkbannisanuraziza@gmail.com

Abstract

The correctional system in Indonesia currently faces various challenges, making it not yet fully comparable to the systems implemented in more developed countries. Amid the wave of globalization, the need for reform in this system is becoming increasingly urgent, particularly to enhance the effectiveness of inmate rehabilitation. This research aims to explore key elements of correctional systems in various countries that have successfully reduced recidivism rates and improved the quality of social reintegration. By employing literature review and comparative analysis methods, the study focuses on innovative approaches to rehabilitation, educational programs, and post-incarceration support. The results reveal that these practices have significantly positive impacts on both inmates' lives and society as a whole. However, the application of these practices in Indonesia may encounter challenges, especially in terms of regulatory adjustments and local cultural adaptation. The conclusion of this study emphasizes that adopting best practices from international correctional systems not only enhances the effectiveness of rehabilitation but also provides new hope for the future of correctional clients in Indonesia, paving the way for a more humane and sustainable transformation.

Keywords: *correctional system; rehabilitation; education; post-incarceration support; Indonesian*

Abstrak

Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang membuatnya belum sepenuhnya sebanding dengan sistem yang diterapkan di beberapa negara maju. Di tengah arus globalisasi, kebutuhan untuk melakukan reformasi terhadap sistem ini semakin mendesak, terutama dalam rangka meningkatkan efektivitas rehabilitasi narapidana. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali elemen-elemen kunci dari sistem pemasyarakatan di berbagai negara yang telah menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka residivisme dan memperbaiki kualitas reintegrasi sosial. Dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis perbandingan, fokus kegiatan diarahkan pada pendekatan rehabilitasi, program pendidikan, dan dukungan pasca-pemasyarakatan yang inovatif. Hasilnya, terungkap bahwa praktik-praktik tersebut mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan narapidana dan masyarakat secara keseluruhan. Meski demikian, penerapan di Indonesia mungkin menemui tantangan, terutama terkait penyesuaian regulasi dan budaya lokal. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa mengadopsi praktik terbaik dari sistem pemasyarakatan internasional tidak hanya memungkinkan peningkatan efektivitas rehabilitasi, tetapi juga memberi harapan baru bagi masa depan klien pemasyarakatan di Indonesia, membuka jalan bagi transformasi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Kata Kunci: sistem pemasyarakatan; rehabilitasi; pendidikan; dukungan pasca-pemasyarakatan; Indonesia

Accepted: 2024-10-17

Published: 2025-02-02

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan. Dalam konteks globalisasi, tantangan yang dihadapi oleh sistem pemasyarakatan semakin kompleks. Menurut laporan World Prison Brief, jumlah narapidana di seluruh dunia terus meningkat, dengan lebih dari 10 juta orang dipenjarakan pada tahun 2021 (Walmsley, 2021). Di Indonesia, sistem pemasyarakatan juga menghadapi berbagai permasalahan, seperti overkapasitas penjara, kurangnya program rehabilitasi yang efektif, dan stigma sosial terhadap mantan narapidana (UU Nomor 22 Tahun 2022).

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tahun 2022, terdapat lebih dari 270.000 narapidana di penjara yang dirancang untuk menampung

hanya 130.000 orang (Kemenkumham, 2022). Overkapasitas ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik penjara, tetapi juga pada kesehatan mental dan fisik narapidana. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia agar lebih manusiawi dan efektif dalam rehabilitasi.

Studi perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem pemasyarakatan yang lebih baik dapat memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik yang dapat diadopsi. Negara-negara seperti Norwegia, Swedia, dan Belanda dikenal memiliki sistem pemasyarakatan yang lebih progresif, fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Prison Policy Initiative, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dan menganalisis elemen-elemen kunci dari sistem tersebut yang dapat diterapkan di Indonesia.

Dalam konteks kegiatan ini, terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab. Pertama, apa saja praktik terbaik yang diterapkan di negara lain dalam sistem pemasyarakatan mereka? Praktik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen penjara, program rehabilitasi, hingga dukungan pasca-pemasyarakatan. Kedua, tantangan apa yang mungkin dihadapi dalam penerapan praktik tersebut di Indonesia? Tantangan ini dapat mencakup keterbatasan sumber daya, resistensi budaya, dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung reformasi sistem pemasyarakatan.

Pentingnya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya untuk memahami kondisi saat ini, tetapi juga untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan memahami praktik terbaik dari negara lain, diharapkan dapat ditemukan solusi yang relevan dan efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari sistem pemasyarakatan yang inovatif dan efektif yang diterapkan di negara-negara lain. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis potensi adopsi praktik terbaik tersebut di Indonesia, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang ada. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Melalui analisis mendalam, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem pemasyarakatan yang lebih baik dapat berkontribusi pada penurunan angka kriminalitas dan peningkatan keamanan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada mengenai sistem pemasyarakatan dan rehabilitasi narapidana.

Kajian literatur ini akan membahas sistem pemasyarakatan di Indonesia, serta membandingkannya dengan sistem yang diterapkan di negara-negara lain. Di Indonesia, sistem pemasyarakatan diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Namun, implementasi dari undang-undang ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya dana dan sumber daya manusia yang terlatih (Sukardi, 2022).

Sementara itu, studi tentang sistem pemasyarakatan di negara-negara seperti Norwegia menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi yang holistik dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Menurut kegiatan oleh Prison Reform International, Norwegia memiliki tingkat *recidivism* yang sangat rendah, yaitu sekitar 20% dalam lima tahun setelah dibebaskan, dibandingkan dengan sekitar 50% di banyak negara lain (Prison Reform International, 2020). Pendekatan ini melibatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis yang komprehensif.

Selain itu, kajian literatur juga akan mencakup teori dan bukti empiris terkait rehabilitasi narapidana. Menurut teori rehabilitasi, narapidana dapat berubah dan berintegrasi kembali ke masyarakat jika diberikan dukungan yang tepat (Andrews & Bonta, 2010). Kegiatan menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang efektif dapat mengurangi tingkat kriminalitas dan meningkatkan keamanan masyarakat secara keseluruhan (Lipsey, 2009).

Dalam kajian ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai model pemasyarakatan yang ada di dunia dan bagaimana model-model tersebut dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Dengan memahami praktik terbaik dalam rehabilitasi narapidana, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada di sistem pemasyarakatan Indonesia.

METODE

Kegiatan ini menggunakan desain studi literatur dan analisis perbandingan untuk mengeksplorasi sistem pemasyarakatan di berbagai negara. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan, serta membandingkan praktik terbaik yang diterapkan di negara-negara lain dengan kondisi di Indonesia. Dalam studi ini, peneliti akan menganalisis data dari laporan resmi, artikel jurnal, dan studi kasus yang ada, guna mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang sistem pemasyarakatan yang efektif dan inovatif.

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini meliputi narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat luas. Narapidana menjadi fokus utama karena mereka adalah subjek langsung dari sistem pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan juga menjadi sasaran karena mereka memiliki peran penting dalam implementasi program rehabilitasi dan reintegrasi. Masyarakat, sebagai bagian dari lingkungan sosial narapidana, akan menjadi penting dalam proses penerimaan dan dukungan terhadap reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan di Indonesia dan negara-negara yang menjadi objek studi, seperti Norwegia, Swedia, dan Belanda. Pemilihan negara-negara tersebut didasarkan pada reputasi mereka dalam menerapkan sistem pemasyarakatan yang berhasil dan inovatif. Dengan membandingkan praktik di negara-negara tersebut dengan sistem di Indonesia, diharapkan dapat ditemukan elemen-elemen kunci yang dapat diadopsi untuk perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode literatur, laporan, dan studi kasus. Data primer akan diambil dari wawancara dengan narapidana dan petugas pemasyarakatan, sedangkan data sekunder akan diambil dari artikel jurnal, laporan kegiatan, dan dokumen resmi dari lembaga terkait. Peneliti juga akan menggunakan statistik yang relevan untuk mendukung analisis, seperti tingkat *recidivism*, angka keberhasilan program rehabilitasi, dan indikator sosial lainnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas sistem pemasyarakatan yang ada.

Kriteria evaluasi keberhasilan sistem pemasyarakatan akan dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Secara deskriptif, peneliti akan mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian melalui survei yang dilakukan kepada narapidana dan petugas pemasyarakatan. Survei ini akan mencakup pertanyaan mengenai perubahan sikap, kondisi sosial budaya, dan aspek ekonomi masyarakat sasaran setelah penerapan program rehabilitasi. Selain itu, analisis kualitatif akan dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali pengalaman dan pandangan narapidana serta petugas mengenai sistem pemasyarakatan yang ada. Dengan metode ini, diharapkan dapat diukur sejauh mana perubahan yang terjadi sebagai dampak dari program yang diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Terbaik di Negara Lain

Sistem pemasyarakatan di Norwegia sering kali dijadikan contoh terbaik dalam praktik rehabilitasi narapidana. Dengan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi, Norwegia telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi narapidana

ke dalam masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan sistem ini adalah tingkat *recidivism* (kembali berbuat kejahatan) yang sangat rendah, yaitu sekitar 20% dalam lima tahun setelah dibebaskan, dibandingkan dengan rata-rata internasional yang mencapai 50% (Pratt, 2013). Program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang ditawarkan di penjara, seperti kursus memasak dan keterampilan kerja, memberikan narapidana kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan peluang kerja setelah dibebaskan (Skardhamar & Telle, 2012).

Pendekatan rehabilitasi di Norwegia juga mencakup dukungan psikologis dan sosial yang intensif. Narapidana diberikan akses ke konseling dan terapi untuk mengatasi masalah mental yang mungkin menjadi penyebab perilaku kriminal mereka. Selain itu, sistem pemasyarakatan Norwegia menekankan pentingnya hubungan antara narapidana dan petugas pemasyarakatan, di mana petugas berperan sebagai mentor dan pembimbing, bukan sekadar pengawas (Farrall, 2016). Hal ini menciptakan atmosfer saling percaya yang sangat penting dalam proses rehabilitasi.

Salah satu contoh nyata dari keberhasilan sistem ini adalah penjara Bastoy, yang terletak di pulau terpencil di Norwegia. Penjara ini dirancang seperti komunitas kecil, di mana narapidana hidup dalam kondisi yang mirip dengan kehidupan sehari-hari, termasuk bekerja di pertanian dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Penjara ini memiliki tingkat *recidivism* yang sangat rendah, dengan hanya 16% narapidana yang kembali ke penjara setelah dibebaskan (Bastoy Prison, 2020). Model ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada narapidana, mereka dapat belajar untuk berfungsi secara positif di masyarakat.

Namun, meskipun sistem pemasyarakatan Norwegia memiliki banyak keunggulan, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah biaya operasional yang tinggi untuk menjalankan program-program rehabilitasi yang komprehensif. Dalam konteks Indonesia, di mana anggaran untuk sistem pemasyarakatan sering kali terbatas, penerapan model ini mungkin memerlukan penyesuaian yang signifikan (Lembaga Kegiatan Kebijakan, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks lokal dalam mengadopsi praktik terbaik dari negara lain.

Secara keseluruhan, praktik pemasyarakatan di Norwegia memberikan banyak pelajaran berharga bagi negara lain, termasuk Indonesia. Dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi, serta dukungan psikologis yang memadai, sistem ini menunjukkan bahwa pendekatan yang manusiawi dan berbasis pada pengembangan diri dapat mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Namun, tantangan dalam penerapan model ini di negara dengan sumber daya yang terbatas perlu dipertimbangkan dengan serius.

2. Tantangan Penerapan di Indonesia

Meskipun praktik terbaik dari sistem pemasyarakatan di negara lain seperti Norwegia memberikan inspirasi, penerapannya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun infrastruktur. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM, kapasitas penjara di Indonesia sering kali melebihi batas, dengan rasio narapidana terhadap petugas yang tidak seimbang

(Kemenkumham, 2022). Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyediakan program rehabilitasi yang memadai dan perhatian individual bagi narapidana.

Resistensi budaya dan sosial juga menjadi penghalang dalam penerapan praktik terbaik. Masyarakat Indonesia umumnya memandang narapidana dengan stigma negatif, yang menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah dibebaskan. Kegiatan menunjukkan bahwa stigma sosial dapat meningkatkan risiko recidivism, karena mantan narapidana sering kali kesulitan menemukan pekerjaan dan dukungan sosial yang diperlukan (Sari, 2021). Oleh karena itu, kampanye kesadaran masyarakat yang mengedukasi tentang pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sangat diperlukan untuk mengurangi stigma ini.

Kebijakan pemerintah dan regulasi juga mempengaruhi efektivitas sistem pemasyarakatan di Indonesia. Meskipun ada beberapa upaya untuk memperbaiki sistem, seperti program rehabilitasi dan reintegrasi yang diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, implementasinya sering kali terhambat oleh birokrasi dan kurangnya dukungan anggaran (Bappenas, 2021). Selain itu, kurangnya pelatihan bagi petugas pemasyarakatan dalam hal rehabilitasi dan dukungan psikologis juga menjadi kendala, mengingat banyak petugas yang masih berorientasi pada pengawasan ketat daripada pembinaan.

Tantangan lainnya adalah kurangnya data dan kegiatan yang mendalam mengenai efektivitas program rehabilitasi yang ada di Indonesia. Banyak program yang dilaksanakan tidak dievaluasi secara sistematis, sehingga sulit untuk mengetahui mana yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki. Kegiatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk memahami kebutuhan narapidana dan mengembangkan program yang lebih efektif (Hidayah, 2022).

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dan fleksibel dalam sistem pemasyarakatan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dapat menciptakan sinergi yang diperlukan untuk mendukung rehabilitasi narapidana. Dengan memperhatikan konteks lokal dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Indonesia dapat mengembangkan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan manusiawi.

KESIMPULAN

Kegiatan ini menunjukkan bahwa ada beberapa elemen kunci dari sistem pemasyarakatan yang dapat diadopsi dari praktik terbaik di negara lain, seperti Norwegia dan Swedia. Elemen-elemen tersebut termasuk pendekatan rehabilitasi yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta dukungan yang kuat pasca-pemasyarakatan untuk membantu narapidana reintegrasi ke dalam masyarakat. Keberhasilan sistem pemasyarakatan di negara-negara tersebut terletak pada pendekatan humanis yang mengutamakan hak asasi manusia, serta investasi dalam infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung rehabilitasi. Namun, kelemahan yang terlihat adalah tantangan dalam hal pembiayaan dan penerapan kebijakan yang konsisten di lapangan. Untuk meningkatkan sistem pemasyarakatan di Indonesia, disarankan agar pemerintah mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dengan mempertimbangkan konteks lokal. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk peningkatan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan, pengembangan program pendidikan yang relevan bagi narapidana, serta penciptaan lingkungan

yang mendukung rehabilitasi. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait juga harus ditekankan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi, sehingga stigma terhadap narapidana dapat diminimalisir. Terdapat peluang besar untuk mengembangkan program pendidikan dan rehabilitasi yang lebih baik di Indonesia. Dengan mengadopsi model-model yang telah terbukti efektif di negara lain, Indonesia dapat menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan produktif. Kegiatan lebih lanjut tentang implementasi praktik terbaik di Indonesia sangat diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas dan penyesuaian yang diperlukan. Hal ini termasuk studi kasus yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan pemasyarakatan dapat diubah untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang praktik terbaik di negara lain, tetapi juga membuka jalan untuk perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang lebih berkelanjutan dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). *The Psychology of Criminal Conduct*. Routledge.
- Walmsley, R. (2021). *World Prison Population List*. Institute for Criminal Policy Research.

Laporan Pemerintah

- Bappenas. (2021). *Laporan Evaluasi Program Rehabilitasi Narapidana*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kemenkumham. (2022). *Laporan Tahunan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Kemenkumham. (2022). *Laporan tahunan sistem pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Lembaga Kegiatan Kebijakan. (2021). *Analisis sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kegiatan Kebijakan.

Artikel Jurnal

- Farrall, S. (2016). Rehabilitating offenders: The role of the prison environment. *Journal of Criminology*, 49(3), 245-266.
- Hidayah, N. (2022). Evaluasi program rehabilitasi narapidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 10(1), 15-30.
- Lipsey, M. W. (2009). The primary factors that characterize effective interventions with juvenile offenders: A meta-analytic overview. *Victims and Offenders*, 4(2), 124-147.
- Pratt, J. (2013). The politics of imprisonment: The case of Norway. *Punishment & Society*, 15(4), 442-463.
- Sari, R. (2021). Stigma sosial terhadap mantan narapidana di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(2), 112-127.
- Skardhamar, T., & Telle, K. (2012). The effect of education on recidivism. *Journal of Quantitative Criminology*, 28(4), 485-508.
- Sukardi, S. (2022). Reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 1-20.

Laporan Organisasi/NGO

- Prison Policy Initiative. (2020). *Mass incarceration: The whole pie 2020*. Diakses dari <https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2020.html>

Prison Reform International. (2020). World prison brief. Diakses dari <https://www.prisonstudies.org/world-prison-brief>

Website

Bastoy Prison. (2020). Rehabilitation and reintegration. Diakses dari <https://www.bastoy.no>.